

Strategi Intelijen Kepolisian dalam Pengungkapan Sindikat Narkoba di Wilayah Polres Ogan Komering Ulu Selatan

Mohammad Fayshalhadi Ishomul Falah* , Karnadji, Prawitra Thalib

Universitas Airlangga, Indonesia

Email: aisfayshal26@gmail.com*

Keywords:

Intelligence Strategy; Drug
Syndicate Disclosure; Ogan
Komering Ulu Selatan Police

Abstract

This research examines police intelligence strategies in uncovering drug syndicates within the jurisdiction of the Ogan Komering Ulu Selatan Police Department. Drug syndicates are a serious threat requiring effective intelligence approaches for their management. The study aims to identify intelligence methods applied, the challenges encountered, and solutions to improve the effectiveness of drug network exposure. The research employs a qualitative case study approach through the collection of primary and secondary data. Findings reveal that the success of uncovering drug syndicates is highly influenced by the implementation of structured intelligence strategies, including data collection, network analysis, use of technology, and collaboration with relevant parties. However, limitations in human resources and coordination barriers present major challenges in intelligence operations. This study recommends enhancing human resource capacity, strengthening inter-agency cooperation, and utilizing advanced technology to improve the timeliness and accuracy of police responses. With adaptive and synergistic intelligence strategies, it is expected that drug syndicate control in the Ogan Komering Ulu Selatan Police jurisdiction can be more optimal and sustainable, while providing maximum protection for the community from the negative impacts of drugs.

Kata Kunci:

Strategi Intelijen; Pengungkapan
Narkoba; Polres Ogan Komering
Ulu Selatan

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi intelijen kepolisian dalam mengungkap sindikat narkoba di wilayah Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Sindikat narkoba merupakan ancaman serius yang memerlukan pendekatan intelijen yang efektif untuk penanganannya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode-metode intelijen yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta solusi untuk meningkatkan efektivitas pengungkapan jaringan narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan pengungkapan sindikat narkoba sangat dipengaruhi oleh penerapan strategi intelijen yang terstruktur, termasuk pengumpulan data, analisis jaringan, penggunaan teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan hambatan koordinasi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan operasi intelijen. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, penguatan kerja sama antar lembaga, dan pemanfaatan teknologi terkini guna meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons kepolisian. Dengan strategi intelijen yang adaptif dan sinergis, diharapkan penanggulangan sindikat narkoba di wilayah Polres Ogan Komering Ulu Selatan dapat lebih optimal dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari dampak negatif narkoba.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, permasalahan narkoba telah menjadi salah satu isu krusial yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional Indonesia (Piyan, 2024). Peredaran narkoba tidak hanya berdampak negatif terhadap kualitas sumber daya

manusia dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi sarang berbagai tindak kriminal lain seperti korupsi, kekerasan, hingga permasalahan sosial yang meluas. Kejahatan narkoba di Indonesia telah bertransformasi menjadi jaringan sindikat besar yang melibatkan berbagai aktor mulai dari produsen, pengedar, hingga pengguna yang tersebar di berbagai provinsi hingga wilayah perbatasan (Hasan, R., & Nurhadi, 2020).

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai bagian dari kawasan Sumatera Selatan, mengalami tekanan yang cukup tinggi terkait masuknya peredaran narkoba. Lokasinya yang strategis dengan akses jalur transportasi yang cukup terbuka dan daerah yang cukup luas menjadikan wilayah ini rentan menjadi titik transit dan distribusi narkoba baik dari maupun ke wilayah lain. Kondisi ini diperparah dengan adanya indikasi bahwa sindikat narkoba telah memanfaatkan kekosongan pengawasan di beberapa daerah serta adanya jaringan sindikat yang terorganisir dan tersembunyi dengan baik, sehingga diperlukan strategi intelijen yang efektif dan responsif (Ambarwati, D., & Gunawan, 2021).

Fenomena ini menuntut Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk tidak hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga mengembangkan strategi intelijen yang berbasis teknologi informasi, analisis data yang komprehensif, serta pendekatan kolaboratif dengan berbagai stakeholder. Strategi intelijen yang efektif harus mampu melakukan identifikasi awal terhadap pergerakan jaringan narkoba, melakukan pengawasan secara dinamis, dan memetakan pola operasional sindikat narkoba secara tepat agar dapat dilimpahkan ke proses penegakan hukum secara cepat dan akurat.

Lebih jauh studi ini akan mengkaji bagaimana faktor internal seperti kualitas pelatihan personel intelijen, sistem manajemen informasi, dan budaya kerja berpengaruh terhadap efektivitas strategi intelijen tersebut. Di sisi lain, faktor eksternal seperti tekanan sosial, politik, serta dinamika hukum dan regulasi juga menjadi variabel penting yang mempengaruhi kinerja pengungkapan sindikat narkoba. Komplektas ini menuntut kajian mendalam agar dapat merumuskan model strategi intelijen yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan preventif.

Beberapa penelitian telah mengkaji strategi intelijen kepolisian dalam pemberantasan narkoba. Penelitian oleh Hasan & Nurhadi (2022) menunjukkan bahwa strategi intelijen di wilayah Sumatera Selatan masih menghadapi kendala koordinasi antar unit dan keterbatasan teknologi. Sementara itu, Andika (2022) menemukan bahwa penerapan strategi intelijen di Jawa Timur lebih berhasil karena didukung oleh pelatihan personel yang berkelanjutan dan sinergi dengan BNN. Lestari (2023) mengidentifikasi bahwa hambatan birokrasi dan regulasi menjadi faktor utama yang memperlambat pengungkapan kasus narkoba di Surabaya. Penelitian oleh Wibowo (2022) menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam meningkatkan efektivitas operasi intelijen. Namun, studi-studi tersebut sebagian besar berfokus pada wilayah perkotaan atau provinsi dengan akses sumber daya yang lebih baik, sementara penelitian di wilayah kabupaten dengan karakteristik geografis luas dan keterbatasan sumber daya seperti Ogan Komering Ulu Selatan masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji integrasi antara peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi terkini, penguatan sinergi antar lembaga, dan reformasi kebijakan secara simultan dalam satu kerangka strategi intelijen di tingkat Polres.

Kesenjangan penelitian ini terletak pada kurangnya kajian empiris tentang strategi intelijen kepolisian di wilayah kabupaten dengan karakteristik geografis luas, akses terbatas,

dan tingkat kerawanan narkoba yang tinggi, seperti Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada wilayah perkotaan atau provinsi dengan sumber daya melimpah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang mengintegrasikan empat aspek kunci strategi intelijen (SDM, teknologi, sinergi lintas lembaga, dan reformasi kebijakan) dalam konteks wilayah kabupaten yang tertinggal, serta menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus yang mendalam. Dengan latar belakang penelitian ini maka penting untuk menggali secara rinci dan kritis mengenai strategi intelijen Polres Ogan Komering Ulu Selatan dalam menghadapi sindikat narkoba, mencakup aspek taktis, teknis, hingga strategis. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang relevan dan aplikatif bagi peningkatan kapabilitas intelijen kepolisian serta mendorong sinergi multisektor dalam pemberantasan narkoba yang semakin massif dan terorganisir di wilayah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi intelijen yang diterapkan oleh Polres Ogan Komering Ulu Selatan dalam mengungkap sindikat narkoba, serta untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi intelijen tersebut. Manfaat penelitian ini terbagi dalam tiga aspek. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu kepolisian, khususnya dalam bidang intelijen, dengan memperkaya kajian tentang taktik, metode, dan pendekatan yang efektif dalam pemberantasan kejahatan narkoba. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan konsep dan model strategi intelijen yang adaptif yang dapat diterapkan di wilayah lain dengan karakteristik serupa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi jajaran Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi intelijen yang lebih efektif, responsif, dan efisien, serta mengoptimalkan operasi intelijen dan penyusunan taktik penegakan hukum yang tepat sasaran. Hasil penelitian juga berpotensi menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan internal kepolisian untuk meningkatkan koordinasi, alokasi sumber daya, dan pemberdayaan personel intelijen. Secara sosial, penelitian ini memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Dengan meningkatnya efektivitas strategi intelijen, diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan terkait narkoba, yang merupakan ancaman serius bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Dampak positif dari penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda melalui pendidikan dan penyuluhan untuk hidup sehat dan bebas dari narkoba.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang berfokus pada eksplorasi fenomena sosial berupa strategi intelijen kepolisian. Tipe kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap proses, pola, dan makna yang terjadi dalam praktik pengungkapan sindikat narkoba yang bersifat kompleks dan dinamis. Penelitian ini bersifat studi kasus (*case study*) yang mengangkat Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan sebagai objek utama untuk diinvestigasi secara intensif.

Penjelasan ilmiah tipe ini menegaskan bahwa fenomena yang diteliti tidak dapat diukur secara statistik saja, melainkan perlu dianalisis dari perspektif kontekstual, sosial, dan kultural yang relevan. Studi kasus memberikan ruang untuk menggambarkan keseluruhan konteks dinamika pelaksanaan intelijen kepolisian dalam skala nyata dan detail, memperlihatkan interaksi antara personel, strategi, dan lingkungan kerja.

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yang mengarahkan penelitian pada pemaparan detail serta analisa kritis mengenai strategi intelijen kepolisian dalam pengungkapan sindikat narkoba. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh tidak hanya dideskripsikan tetapi dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, hambatan, dan faktor keberhasilan.

Metode pengumpulan data yang utama adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menggali perspektif dan pengalaman langsung dari para pelaku di lapangan, termasuk Kasat Narkoba, Kanit IDIK, dan anggota Banit IDIK. Selain itu, digunakan observasi partisipatif dengan keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas sehari-hari Satresnarkoba, sehingga memperoleh pemahaman komprehensif terhadap prosedur dan dinamika operasional. Peneliti juga memanfaatkan dokumentasi resmi, seperti laporan penyidikan, strategi intelijen, dan hasil operasi pengungkapan untuk memperkaya data.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam konteks penelitian tentang strategi intelijen kepolisian dalam pengungkapan narkoba pada wilayah kepolisian meliputi beberapa jenis sumber, yaitu:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber yang memiliki kedudukan utama dalam penelitian hukum. Dalam konteks pengungkapan sindikat narkoba oleh kepolisian terutama di Wilayah Polres Ogan Komering Ulu Selatan, sumber hukum primer meliputi:

1. Peraturan Perundang-undangan:
 - a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Ini adalah landasan hukum pokok yang mengatur segala sesuatu tentang narkotika, termasuk jenis narkotika, sanksi hukum terhadap pengedar dan pengguna, serta tata cara pengawasan dan pemberantasan.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berisi ketentuan-ketentuan pokok mengenai tindak pidana yang terkait, misalnya terkait kejahatan narkoba, penyidikan, dan proses peradilan pidana.
 - c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Menjelaskan tugas, fungsi, dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia, termasuk kemampuan intelijen dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.
 - d. Peraturan Kapolri terkait Intelijen Kepolisian Meliputi kebijakan, standar prosedur, dan mekanisme kerja intelijen yang menjadi landasan operasional dalam pengungkapan sindikat narkoba.
 - e. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait pelaksanaan tugas dalam pemberantasan narkoba dan intelijen kepolisian.
2. Putusan Pengadilan Hasil putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat dapat dijadikan sumber hukum primer untuk mengkaji preseden atau penerapan hukum dalam kasus pengungkapan narkoba.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber ini merupakan bahan pendukung yang membantu dalam memahami dan menerapkan hukum yang ada, meliputi:

1. Buku-buku akademik dan monograf mengenai hukum pidana, hukum narkotika, dan intelijen kepolisian
2. Artikel ilmiah, jurnal, dan thesis yang membahas strategi pemberantasan narkoba, metode intelijen, dan studi kasus pengungkapan sindikat narkoba
3. Laporan penelitian dan hasil seminar terkait pemberantasan narkoba di Indonesia
4. Referensi dari disiplin ilmu lain seperti kriminologi, ilmu politik, dan sosiologi yang membantu menganalisis fenomena penyalahgunaan narkoba dan strategi penanggulangannya

c. Sumber Hukum Tersier

1. Kamus hukum dan ensiklopedia yang menjelaskan istilah-istilah teknis dan konsep-konsep dasar hukum
2. Direktori hukum dan komentar atas peraturan yang meminimalisir kesalahan interpretasi
3. Website resmi lembaga terkait, seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan situs resmi Kepolisian RI

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam konteks penelitian hukum dan strategi intelijen, berikut teknik pengumpulan bahan hukum yang dapat Anda gunakan:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini sangat penting untuk mendapatkan landasan teori dan bukti hukum yang valid, serta membangun kerangka konseptual dan teoritis tesis Anda. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari:

1. Buku teks hukum, jurnal akademik, tesis, artikel ilmiah
2. Naskah perundang-undangan dan dokumen resmi lain
3. Sumber-sumber digital, perpustakaan online, dan database hukum seperti Hukumonline, Google Scholar, dan perpustakaan universitas

Melalui studi kepustakaan, Anda dapat mengidentifikasi gap penelitian serta teori-teori yang sudah dan belum diterapkan dalam konteks pengungkapan sindikat narkoba.

b. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara ini berfungsi untuk memperoleh data empiris dan keterangan langsung dari pelaku atau ahli yang berkompeten. Narasumber dalam penelitian ini bisa meliputi:

1. Pejabat intelijen di Polres Ogan Komering Ulu Selatan
2. Penyidik narkoba dan petugas lapangan yang terlibat dalam pengungkapan sindikat narkoba
3. Akademisi atau ahli hukum pidana dan intelijen
4. Tokoh masyarakat yang terlibat dalam pencegahan narkoba di wilayah setempat

Wawancara dapat dibagi menjadi wawancara terstruktur, semi-terstruktur, atau bebas, tergantung kebutuhan untuk mendapatkan informasi detail dan relevan.

c. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan untuk memahami pelaksanaan strategi intelijen secara langsung. Bentuk observasi dapat berupa:

1. Partisipasi pengamatan dalam kegiatan operasi intelijen Polres
2. Pengamatan tidak partisipatif untuk mencatat prosedur dan dinamika kerja di unit intelijen
3. Observasi dokumentasi pelaporan dan koordinasi antar satuan kerja

Metode ini membantu mendalami aspek praktis selain aspek teoritis yang didapat dari studi kepustakaan dan wawancara.

d. Dokumentasi

Pengumpulan dokumen meliputi:

1. Laporan resmi kepolisian tentang operasi pengungkapan narkoba
2. Berita acara pemeriksaan (BAP), laporan hasil penyidikan, dan dokumen pendukung pengejaran kasus
3. Kebijakan internal kepolisian terkait intelijen dan analisis risiko
4. Berita dari media massa yang memuat informasi terkait pengungkapan sindikat narkoba di wilayah kajian

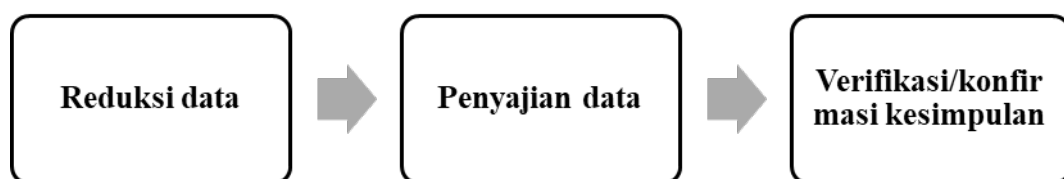
e. Analisis Peraturan dan Kebijakan

Melakukan telaah mendalam terhadap berbagai peraturan terkait diberlakukannya strategi intelijen di lapangan. Teknik ini dilakukan secara kualitatif dengan:

1. Analisis isi (*content analysis*) untuk memahami arah kebijakan dan legalitas
2. Membandingkan kebijakan formal dengan praktik lapangan melalui temuan dari wawancara dan observasi,

Analisa Bahan Hukum

Proses analisis data mengikuti metode analisis tematik berbasis kualitatif yang melibatkan tiga tahap utama yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.



Gambar 1. Proses Analisis Data

Sumber: Dikembangkan oleh peneliti berdasarkan model analisis data Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

1. Reduksi data dilakukan dengan memilah, merangkum, dan menyaring data yang diperoleh sehingga fokus pada informasi yang relevan dengan strategi intelijen dalam pengungkapan sindikat narkoba. Peneliti mengeliminasi data yang tidak signifikan untuk memudahkan analisis mendalam ke dalam tema dan subtema yang muncul.

2. Penyajian data menggunakan teknik naratif dan tabel tematik untuk memaparkan hasil temuan dengan sistematis dan mudah dipahami.
3. Verifikasi/konfirmasi kesimpulan dilaksanakan dengan metode triangulasi sumber data dan teknik peer debriefing untuk memastikan validitas dan reliabilitas data.

Analisis juga menggali hubungan sebab-akibat, tantangan operasional, faktor pendukung, serta rekomendasi strategis terhadap efektivitas intelijen kepolisian dalam rangka pemberantasan narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi dan Upaya Peningkatan Pelaksanaan Strategi Intelijen

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Intelijen

Pada era yang sangat dinamis dan penuh tantangan ini, peran SDM intelijen dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan kejahatan, khususnya di wilayah Polres OKU Selatan, semakin krusial. Semakin kompleksnya modus operandi kejahatan dan semakin canggihnya teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan menuntut personel intelijen untuk selalu siap, adaptif, dan kompeten.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM intelijen tidak hanya menjadi sebuah kebutuhan administratif atau formalitas semata, melainkan menjadi elemen vital dalam mempertahankan efektivitas strategi intelijen yang mampu beradaptasi dengan perubahan situasi yang selalu bergerak cepat.

Upaya peningkatan kapasitas SDM di Polres OKU Selatan meliputi dua spektrum utama, yakni peningkatan hard skills dan soft skills. Hard skills berupa kemampuan teknis terkait pengolahan data intelijen, penguasaan teknologi informasi, analisis data, serta keterampilan lapangan. Sedangkan soft skills mencakup aspek kepemimpinan, komunikasi efektif, manajemen stres, dan etika profesi intelijen.

AKP Alimin, S.H., Kasat Narkoba, menekankan:

"Penting bagi kami bukan hanya memahami teknik penyelidikan atau pengumpulan data intelijen, tapi juga kemampuan mengelola tekanan psikologis, menjalin kerjasama, dan menjunjung tinggi etika agar intelijen mampu dipercaya dan profesional."

Polres OKU Selatan menjalankan berbagai metode pelatihan, mulai dari pelatihan internal yang diselenggarakan secara reguler, pelatihan eksternal yang difasilitasi instansi terkait, hingga workshop berbasis simulasi kasus nyata dan studi lapangan. Pelatihan teknologi informasi dan sistem informasi manajemen intelijen menjadi fokus untuk meningkatkan kemampuan operasional di era digital.

Iptu Afriandi, Kaurmintu, menyatakan:

"Kami mencoba menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, kami juga mendorong personel mengikuti seminar dan kursus yang mengadopsi teknologi terbaru, supaya kemampuan mereka tidak ketinggalan zaman."

Penguasaan teknologi menjadi salah satu pilar peningkatan kapasitas SDM intelijen. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan pengolahan data, personel intelijen harus mampu menggunakan software analisis intelijen, aplikasi keamanan siber, serta platform komunikasi yang efektif.

Bripda Larrasati M.S., Kaurbinops Bamin, mengatakan:

"Digitalisasi informasi memerlukan peningkatan kemampuan teknologi, sebab kecepatan dan keamanan penyampaian informasi sangat menentukan keberhasilan operasi intelijen."

Tantangan utama yang dihadapi dalam proses peningkatan kapasitas SDM intelijen antara lain terbatasnya waktu pelatihan yang tidak mengganggu aktivitas operasional harian, keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan fasilitas, serta resistensi dari sebagian personel terhadap perubahan metode kerja dan adaptasi teknologi baru.

Kanit Idik II, Aiptu Afuan U S.H, M.Si., menuturkan:

"Menyeimbangkan antara tugas operasi dan kebutuhan pelatihan membutuhkan perencanaan yang matang. Kami terus mencoba menyesuaikan jadwal pelatihan, tapi diperlukan dukungan dari pimpinan agar budaya belajar terus berkembang."

Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia (Armstrong, 2020) Menurut Armstrong, pengembangan SDM adalah proses strategis dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu agar sesuai dengan tuntutan kerja dan perubahan lingkungan. Dalam konteks intelijen, proses ini memastikan personel mampu menghadapi kompleksitas tugas yang berubah cepat dan ketat secara profesional.

Teori Pembelajaran Organisasi (Senge, 1990) Senge menjelaskan bahwa organisasi pembelajar adalah organisasi yang membangun kapasitas untuk terus berubah dan beradaptasi melalui pembelajaran berkelanjutan. Pemikiran ini sangat cocok diaplikasikan dalam pengembangan SDM Intelijen, agar personel tidak hanya belajar melalui pelatihan formal, tapi juga meningkatkan inovasi dan responsifitas dalam menghadapi situasi.

Teori Kesiapan Teknologi dan Adopsi Inovasi (Rogers, 2003) Keberhasilan peningkatan kapasitas juga sangat bergantung pada kesiapan personel untuk menerima dan mengadopsi teknologi baru. Teori Rogers menekankan pentingnya faktor sosial, psikologis, dan struktural dalam proses adopsi teknologi, yang relevan untuk memastikan pelatihan teknologi berjalan dengan efektif di unit intelijen.

1. Penguatan program pelatihan yang komprehensif: Termasuk pelatihan teknologi, analisis intelijen, soft skills, dan etika profesi yang terintegrasi dengan kebutuhan operasi nyata.
2. Mekanisme penjadwalan pelatihan fleksibel: Agar personel dapat berpartisipasi tanpa mengganggu tugas utama.
3. Peningkatan fasilitas dan dukungan anggaran: Untuk menyelenggarakan program pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Pembinaan budaya pembelajaran berkelanjutan: Mendorong personel agar aktif belajar dan berinovasi terus menerus.
5. Pendekatan holistik: Menggabungkan pelatihan teknis, psikologis, dan kepemimpinan untuk membangun SDM intelijen yang siap menghadapi berbagai tuntutan tugas masa depan.

2. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Terkini

Di era revolusi industri 4.0 dan era informasi yang sangat cepat berkembang, penggunaan teknologi terkini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak bagi keberhasilan pengelolaan intelijen kepolisian. Polres OKU Selatan menyadari bahwa modus operandi pelaku kejahatan makin kompleks dan dinamis, sehingga metode lama yang hanya mengandalkan pendekatan manual dan tradisional sangat rentan tertinggal.

Teknologi hadir sebagai alat strategis untuk memperluas kapabilitas intelijen mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyebaran informasi secara lebih cermat, cepat, dan aman. Peran teknologi juga sangat vital dalam mendukung koordinasi internal dan eksternal, termasuk kolaborasi dengan lembaga lain seperti BNN, kejaksaan, dan aparat desa. Hal ini sangat krusial dalam konteks pemberantasan narkoba, tindak pidana transnasional, dan ancaman keamanan lainnya.

AKP Alimin, S.H. (Kasat Narkoba) menegaskan:

"Semakin maju teknologi, semakin banyak kita mampu membuka jaringan kejahatan yang selama ini tersembunyi. Tanpa teknologi, kita hanya beroperasi dalam ruang terbatas dan sangat terbatas informasi."

a. Implementasi Spesifik Teknologi dan Inovasi yang Digunakan

Pengembangan teknologi dilakukan secara bertahap dan terfokus pada beberapa bidang, sebagai berikut:

1. Integrasi Sistem Informasi Intelijen (SIM Intelijen): Membangun satu platform yang mengintegrasikan berbagai sumber data, memudahkan personel untuk mengakses dan membagikan informasi secara cepat dan real-time, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. SIM ini juga mendukung tracking kasus dan analisis tren kejahatan.
2. Penggunaan Komunikasi Digital Terenkripsi: Mengoptimalkan perangkat komunikasi berteknologi tinggi, termasuk radio digital dan aplikasi secure messaging untuk melindungi kerahasiaan komunikasi antar petugas intelijen agar tidak mudah disadap pihak tidak bertanggung jawab.
3. Pemanfaatan Data Analytics dan Big Data: Mengadopsi software dan algoritma analitik untuk menelaah pola-pola kejahatan, prediksi perkembangan jaringan kriminal, dan pemetaan wilayah rawan secara otomatis berbasis data kuantitatif dan kualitatif.
4. Teknologi Pengawasan dan Sensor: Penggunaan CCTV dengan kecerdasan buatan (AI), drone pengintai dengan kamera resolusi tinggi, sensor gerak, serta perangkat mobile surveillance yang memungkinkan pengawasan area terpencil dengan efektivitas tinggi tanpa penugasan fisik berlebih.

Bripda Larrasati M.S., Kaurbinops Bamin menjelaskan:

"Penerapan big data dan AI membantu kami menemukan pola transaksi narkoba yang tidak mudah terlihat oleh pengawasan manual. Ini meningkatkan efektivitas operasi lapangan secara signifikan."

b. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Teknologi

Penggunaan teknologi tinggi tak dapat berjalan efektif tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, Polres OKU Selatan melakukan investasi besar dalam pelatihan dan pengembangan SDM dengan fokus pada penguasaan teknologi digital dan aplikasi intelijen modern.

Iptu Afriandi, Kaurmintu menyampaikan:

"Kami mengadakan pelatihan berkelanjutan dengan menghadirkan instruktur lokal dan nasional, mengadopsi metode blended learning yang menggabungkan teori dan praktik

langsung penggunaan perangkat teknologi terkini agar setiap anggota tidak hanya bisa menggunakan, tetapi juga mengoptimalkannya."

c. Manfaat Komprehensif Teknologi dalam Strategi Intelijen

Adopsi teknologi membawa dampak positif yang menyeluruh bagi kegiatan intelijen, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas kerja, serta dari aspek keamanan data:

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas: Otomatisasi pengolahan data mempercepat alur kerja dan mengurangi beban administratif yang menghabiskan waktu.
2. Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Data analitik memungkinkan pengambil keputusan menggunakan fakta dan prediksi ilmiah, bukan hanya intuisi atau pengalaman subjektif.
3. Perlindungan Informasi: Dengan teknologi enkripsi dan firewall, rahasia operasi intelijen terlindungi dari kebocoran atau serangan siber.
4. Fleksibilitas Operasi: Penggunaan drone dan sensor canggih memungkinkan pengawasan area sulit dijangkau, memperluas jangkauan tanpa menambah resiko personel.

Aiptu Afuan U S.H, M.Si., Kanit Idik II menambahkan:

"Teknologi memungkinkan pengawasan yang lebih menyeluruh dan minim risiko, khususnya di daerah terpencil dan saat operasi stand-by, kami bisa mengendalikan situasi dari pusat komando dengan cepat."

d. Hambatan dan Tantangan Penerapan Teknologi

Walaupun kebermanfaatannya jelas, pengembangan dan pemanfaatan teknologi menghadapi beberapa tantangan nyata:

1. Keterbatasan Anggaran: Pengadaan perangkat dan sistem canggih memerlukan dana besar, baik untuk pembelian maupun pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak.
2. Resistensi Kultural: Tidak semua anggota memiliki mentalitas siap berubah dan nyaman menggunakan teknologi baru, sehingga membutuhkan pendekatan persuasif dan pendidikan terus-menerus.
3. Infrastruktur Terbatas: Keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah terutama wilayah pedesaan atau terpencil sangat membatasi penerapan teknologi berbasis online.
4. Kebutuhan Keamanan Siber: Perangkat teknologi rentan terhadap serangan hacker atau penyusupan data, sehingga memerlukan sistem keamanan dan pemantauan yang selalu diperbaharui.

AKP Alimin, S.H. menegaskan:

"Tidak hanya alatnya yang harus canggih, tapi juga sistem keamanannya. Karena informasi intelijen sangat sensitif, kami harus siap menghadapi ancaman siber yang terus berkembang."

Penerapan dan pengembangan teknologi berbasis teori manajemen dan teknologi modern dapat mendorong transformasi yang terarah dan efektif.

1. Dari Perspektif Teori Difusi Inovasi (Everett Rogers): Organisasi harus memperhatikan lima faktor penting yaitu keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, dapat diuji, dan dapat diamati dalam mengadopsi teknologi secara menyeluruh agar penerimaan pengguna maksimal.

2. Pendekatan Manajemen Perubahan (Kotter, 1996): Transformasi digital menuntut adanya komunikasi yang jelas, dukungan manajemen puncak, pembentukan kelompok pendukung perubahan, serta pengimplementasian tahap demi tahap untuk mengatasi hambatan resistensi dan memastikan kelancaran pemakaian.
3. Teori Sistem Informasi dan Teknologi (Laudon & Laudon, 2017): Menekankan pentingnya integrasi antara sistem teknologi yang digunakan dengan kebutuhan organisasi serta pengguna akhir (personel intelijen) untuk memastikan sistem berjalan optimal dan mampu memberikan informasi yang valid dan berguna dalam pengambilan keputusan strategis.

Untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi, berikut adalah rekomendasi yang lebih rinci:

1. Pengadaan Dana Khusus dan Berkelanjutan: Alokasikan anggaran khusus yang tidak hanya sekadar pembelian alat tetapi juga untuk pelatihan, pemeliharaan, dan upgrade.
2. Pelatihan Berjenjang dan Berkesinambungan: Setiap anggota secara periodik mendapatkan pelatihan keterampilan teknologi sesuai tugas dan perkembangan alat.
3. Penguatan Infrastruktur Teknologi Digital: Prioritaskan peningkatan jaringan internet dan fasilitas komunikasi di seluruh wilayah kerja Polres OKU Selatan agar tidak ada area yang terisolasi dari teknologi.
4. Strategi Manajemen Perubahan dan Sosialisasi: Libatkan seluruh anggota sejak tahap awal pemilihan dan uji coba teknologi untuk memperkecil resistensi dan meningkatkan adopsi pemakaian.
5. Kemitraan dan Kolaborasi: Jalin kemitraan strategis dengan institusi akademik, lembaga teknologi, dan vendor untuk riset dan pengembangan teknologi baru yang sesuai kebutuhan operasional kepolisian.

3. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Antar Lembaga

a. Urgensi Sinergi dan Kolaborasi dalam Strategi Intelijen

Sinergi dan kolaborasi antar lembaga merupakan fondasi vital dalam pelaksanaan strategi intelijen yang efektif dan efisien. Di era tantangan kejahatan yang semakin kompleks dan lintas sektoral seperti pemberantasan narkoba, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya, tidak dapat lagi diandalkan pendekatan satu pihak. Kolaborasi mempermudah sharing informasi, koordinasi tugas, serta penggabungan sumber daya baik manusia, teknologi, maupun data intelijen.

Kasat Narkoba Polres OKU Selatan, AKP Alimin, S.H., menegaskan hal ini:

"Kolaborasi adalah tulang punggung agar informasi intelijen tidak terputus di tengah jalan. Sinergi antar lembaga memungkinkan kita menggabungkan kekuatan, memotong waktu dan meningkatkan efektivitas penindakan. Bila masing-masing bekerja sendiri-sendiri maka celah yang berbahaya bisa terjadi."

Hal ini sejalan dengan teori **Sinergi Organisasi** menurut Koontz & Weihrich (2012) yang menyatakan bahwa sinergi adalah keadaan di mana keseluruhan kerja bersama menghasilkan output lebih besar daripada jumlah kerja individual dengan demikian, kolaborasi membuat hasil kerja menjadi lebih optimal.

b. Bentuk dan Mekanisme Kolaborasi Intelijen

Polres OKU Selatan telah menerapkan berbagai mekanisme kolaborasi sebagai berikut:

1. Forum Koordinasi Intelijen dan Operasi Terpadu: Rapat koordinasi rutin yang melibatkan seluruh instansi terkait seperti BNN, Kejaksaan, instansi pemerintah daerah, serta aparat desa sebagai ujung tombak di lapangan. Forum ini difokuskan pada sharing informasi terkini, evaluasi perkembangan kasus, serta pengesahan strategi bersama.
2. Kesepahaman dan Penyamaan Persepsi: Agar tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun miskomunikasi, forum koordinasi juga digunakan untuk menyamakan persepsi, tujuan, dan komunikasi teknis pelaksanaan operasi.
3. Transfer Teknologi dan Informasi: Polres menyediakan sarana teknologi komunikasi intelijen yang handal dan terintegrasi sehingga data dapat dibagi secara cepat dan aman antar lembaga, contohnya pemanfaatan sistem informasi terpadu dan aplikasi berbasis digital.
4. Operasi Bersama di Lapangan: Dalam tahap eksekusi, lembaga terkait mengadakan operasi bersinergi, seperti penggerebekan jaringan narkoba, dimana peran dan fungsi personel serta kewenangan ditata secara jelas.

Kaurmintu, Iptu Afriandi, menyampaikan:

"Forum Intelijen adalah panggung untuk menyatukan persepsi. Dengan adanya koordinasi tetap, setiap instansi tahu peran dan tugasnya dalam rangka membongkar jaringan kejahatan. Itu membantu mencegah duplikasi kerja dan kebingungan."

c. Perspektif dan Pengalaman Internal Intelijen

Petugas intelijen dari berbagai bagian menilai kolaborasi sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan strategi:

1. Bripda Larrasati M.S., Kaurbinops Bamin menyatakan: *"Kolaborasi bukan hanya soal berbagi informasi, tetapi juga pendelegasian tugas dan penerimaan hasil kerja. Ini membantu kami dalam analisis lapangan dengan data lebih luas yang kami dapat dari mitra lembaga."*
2. Aiptu Afuan U S.H, M.Si., Kanit Idik II menambahkan: *"Sinergi mengurangi kerja berulang dan mempercepat penanganan kasus. Komunikasi yang intens menjadikan proses pengumpulan dan konfirmasi data lebih akurat dan cepat."*

d. Hambatan dalam Penguatan Sinergi dan Kolaborasi

Tidak dapat dipungkiri sejumlah hambatan tetap menjadi tantangan:

1. Perbedaan Kepentingan dan Fokus Lembaga: Setiap instansi memiliki mandat dan prioritas yang berbeda. Kadang hal ini membuat komitmen terhadap agenda bersama menjadi tidak maksimal.
2. Kendala Birokrasi dan Regulasi: Prosedur formal yang rumit dan kewenangan yang tumpang tindih dapat memperlambat proses pengambilan keputusan maupun pertukaran informasi.
3. Perbedaan Budaya Organisasi: Setiap lembaga memiliki kultur dan cara kerja yang berbeda, sehingga adaptasi koordinasi kadang menemui kesulitan, terutama dalam hal kecepatan dan transparansi komunikasi.
4. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas SDM: Baik perangkat teknologi maupun kapasitas personel yang terbatas kadang menyebabkan kolaborasi sulit

dipertahankan secara berkelanjutan, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat kota.

Dalam wawancaranya, AKP Alimin mengingatkan:

"Tanpa penguatan sinergi, risiko kebocoran info dan potensi kesalahan fatal sepanjang jalur koordinasi akan meningkat, bahkan bisa menggagalkan seluruh proses operasi."

Dari sisi teori, penguatan sinergi dan kolaborasi ini dapat dianalisis lebih lanjut melalui:

1. Teori Jaringan Kerjasama (Network Theory): Menekankan pentingnya hubungan antar lembaga sebagai node dalam jaringan yang saling terhubung. Semakin kuat koneksi dan komunikasi antar node, semakin efektif aliran informasi dan koordinasi dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.
2. Teori Manajemen Konflik dan Negosiasi (Thomas-Kilmann): Menggarisbawahi pentingnya strategi kolaborasi dalam menyelesaikan konflik antar lembaga agar bisa mencapai kompromi, menghilangkan ego sektoral, dan membangun kesepahaman guna mencapai tujuan bersama.
3. Teori Sistem Sosial (Parsons): Melihat organisasi intelijen sebagai subsistem dalam sistem sosial yang lebih luas. Untuk bekerja optimal, subsistem ini harus selaras dan berintegrasi, sehingga komunikasi, koordinasi, dan fungsi bisa berjalan efektif dalam lingkungan yang dinamis.

Agar sinergi dan kolaborasi ini semakin kuat dan sustainability, maka perlu dilakukan beberapa langkah strategis:

1. Pembentukan Sekretariat Koordinasi Tetap: Sebuah unit khusus yang berfungsi mengelola jalur komunikasi intelijen antara lembaga, mengorganisasi pertemuan rutin, serta menjadi pusat administrasi kolaborasi.
2. Pelatihan Bersama dan Team Building: Menyenggarakan pelatihan, workshop, dan kegiatan rekreatif antar lembaga untuk membangun kepercayaan, meningkatkan komunikasi interpersonal, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Terpadu: Implementasi sistem informasi intelijen yang saling terhubung secara digital untuk sharing data real-time, analisis, dan pelaporan secara efisien dan aman.
4. Penyusunan Protokol Kerjasama (MoU) yang Jelas: Dokumen formal yang mengatur bentuk, ruang lingkup, aturan main, dan kewajiban bersama agar semua pihak memahami dan mengikatkan diri pada kesepahaman bersama.

4. Reformasi Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

a. Esensi Reformasi Kebijakan dan Regulasi dalam Mendukung Strategi Intelijen

Reformasi kebijakan dan regulasi merupakan fondasi krusial untuk menjamin kelancaran pelaksanaan strategi intelijen yang efektif dan adaptif di Polres OKU Selatan. Kebijakan yang responsif harus mampu mengikuti dinamika dan kompleksitas ancaman kejahatan yang berkembang pesat, terutama dalam konteks narkoba, terorisme, dan kejahatan siber. Ketika regulasi ketinggalan zaman dan tidak mengikuti arus perubahan ini, maka implementasi strategis menjadi terhambat oleh prosedur yang kaku dan administratif yang berbelit.

Dari hasil wawancara dengan Kasat Narkoba, AKP Alimin, S.H., tampak jelas urgensi reformasi tersebut:

"Regulasi yang ada saat ini banyak yang bersifat normatif tapi kurang adaptif terhadap kondisi riil di lapangan. Misalnya, dalam penanganan kasus narkoba, proses perizinan dan pelaporan yang berlapis memperlambat langkah kami untuk bergerak cepat dan tepat."

Hal ini memperkuat konsep dalam teori Manajemen Perubahan oleh John Kotter (1996) yang mengatakan bahwa keberhasilan organisasi tergantung pada kemampuannya untuk melakukan transformasi kebijakan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan eksternal. Organisasi polisi harus mengadopsi kebijakan yang mendukung inovasi sekaligus efisiensi operasional, dengan memperhatikan kesinambungan tata kelola yang baik.

b. Kendala Kebijakan dan Regulasi yang Mendasar dan Berulang

Berbagai problematika kebijakan dan regulasi yang menjadi penghalang implementasi strategi intelijen di Polres OKU Selatan antara lain:

1. Kaku dan Tidak Fleksibel: Regulasi yang disusun secara rigid tidak memungkinkan respons cepat terhadap situasi konkret seperti operasi penindakan mendadak.
2. Tumpang Tindih Aturan dan Kurangnya Sinkronisasi: Adanya konflik dan tumpang tindih antara peraturan internal Polri, peraturan daerah, dan regulasi nasional menyebabkan kebingungan di lapangan dan meningkatnya risiko kesalahan prosedural.
3. Proses Administrasi Berat dan Makan Waktu: Prosedur yang panjang dan birokratis untuk mendapat persetujuan dan pelaporan intelijen, termasuk dalam pengumpulan bukti, memerlukan waktu yang signifikan sehingga melemahkan kecepatan respon.
4. SOP Yang Variatif dan Tidak Konsisten: Kurangnya standarisasi penerapan SOP intelijen antarseksi menyebabkan inkonsistensi dan hambatan koordinasi lintas unit.

Dari wawancara dengan Iptu Afriandi (Kaurmintu) diperoleh gambaran:

"Banyak kali kita mengalami kendala dalam hal proses persetujuan dan koordinasi karena regulasi yang tumpang tindih. Kami berharap ke depan ada penyederhanaan aturan supaya eksekusi tugas intelijen tidak terhambat."

c. Perspektif Personel Intelijen Mengenai Reformasi Kebijakan dan Regulasi

Para personel yang langsung menjalankan operasi intelijen memberikan insight yang sangat berharga sebagai dasar pengembangan kebijakan ke depan:

Bripda Larrasati M.S. (Kaurbinops Bamin) menyampaikan:

"Regulasi yang diperbaharui dan mengikuti perkembangan teknologi tentu akan memperkuat daya gerak kita di lapangan. Kebijakan yang update memberi kami rasa lega dan kejelasan untuk bertindak dalam batas hukum."

Aiptu Afuan U S.H, M.Si. (Kanit Idik II) menambahkan:

"Kepastian hukum dari regulasi yang jelas membuat personel lebih berani dan fokus dalam menjalankan tugas tanpa rasa takut salah langkah administratif atau hukum."

Memahami reformasi kebijakan dan regulasi juga dapat diperdalam melalui beberapa teori manajemen dan kebijakan publik:

1. Teori Kebijakan Publik (Public Policy Theory): Menyorot proses dinamis pembuatan hingga pelaksanaan kebijakan yang idealnya responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan lingkungan organisasi. Kebijakan intelijen harus adaptif agar relevan dengan problem kriminalitas yang terus berkembang.

2. Teori Good Governance: Mendorong prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi seluas-luasnya agar keputusan regulasi di sektor intelijen dapat dipertanggungjawabkan serta mendapat dukungan luas dari stakeholder internal dan eksternal.
3. Teori Manajemen Risiko Regulasi: Menekankan bahwa regulasi yang efektif adalah yang mampu mengenali, memitigasi, serta mengelola risiko hukum, proses, dan operasional yang mungkin muncul selama pelaksanaan tugas intelijen.

Dengan memahami teori ini, pengambil kebijakan dapat merancang reformasi yang tidak hanya menjadi pembenahan formalitas administratif, tetapi juga pembentukan kultur kerja yang inovatif dan adaptif.

4. Upaya Strategis Dalam Reformasi Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

Berdasarkan analisa kendala dan masukan internal, beberapa langkah strategis penting dalam reformasi kebijakan dan regulasi yang diusulkan adalah:

1. Harmonisasi Regulasi: Melakukan sinkronisasi dan penyederhanaan antara peraturan internal Polri, peraturan daerah, serta perundangan nasional untuk meminimalisir konflik aturan dan memperlancar alur kerja.
2. Pengembangan SOP Terpadu: Menyusun SOP yang unified dan mengakomodasi komprehensif kebutuhan operasi intelijen, dengan fleksibilitas tertentu untuk adaptasi di lapangan.
3. Digitalisasi Proses Administrasi: Mengimplementasikan teknologi digital yang memungkinkan proses perizinan, pengajuan, dan pelaporan dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan real-time melalui platform elektronik.
4. Advokasi Kebijakan: Menggalang dukungan dari pimpinan Polri tingkat pusat, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif untuk mendukung revisi kebijakan yang mempermudah prosedur dan memberikan payung hukum yang kuat dan fleksibel.
5. Pelatihan dan Sosialisasi Berkelanjutan: Menyelenggarakan program rutin untuk mengedukasi personel intelijen tentang regulasi baru guna memastikan pemahaman yang merata dan pelaksanaan yang konsisten di seluruh unit.

AKP Alimin memaparkan:

"Kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi dan kolaborasi lintas sektor harus menjadi prioritas. Ini kunci supaya strategi intelijen kami berjalan sinergis dan adaptif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan."

Dengan pelaksanaan reformasi kebijakan dan regulasi yang terencana dan berorientasi masa depan, Polres OKU Selatan optimis dapat mengatasi hambatan legal dan prosedural yang selama ini menghambat efektivitas pelaksanaan strategi intelijen. Pendekatan reformasi ini sejalan dengan best practice manajemen kebijakan modern yang menekankan fleksibilitas, inovasi, dan tata kelola yang baik untuk menghadapi tuntutan dinamis di lapangan.

KESIMPULAN

Strategi intelijen yang diterapkan oleh Polres Ogan Komering Ulu Selatan dalam mengungkap sindikat narkoba bersifat terintegrasi dan komprehensif, berfokus pada pengumpulan data intelijen yang sistematis, analisis mendalam, serta kolaborasi intensif antar unit internal Polres dan stakeholder eksternal. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya mencakup kualitas sumber daya manusia yang terlatih, koordinasi antar lembaga yang kuat,

dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai, serta kecepatan pengambilan keputusan operasional berbasis intelijen. Namun, kendala yang dihadapi mencakup birokrasi yang kompleks, keterbatasan regulasi, sumber daya, dan teknologi pendukung, serta hambatan komunikasi antarunit. Solusi yang diusulkan adalah penguatan kapasitas personel melalui pelatihan berkelanjutan, reformasi kebijakan yang responsif, penyederhanaan prosedur operasional, dan pengembangan sinergi lintas sektor. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi pemanfaatan teknologi dalam strategi intelijen, menganalisis sinergi antarlembaga dalam penanggulangan kejahatan narkoba, serta kajian tentang reformasi kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan intelijen Polri. Penelitian eksperimen atau evaluatif juga disarankan untuk menilai dampak pelatihan dan pengembangan SDM intelijen terhadap peningkatan kualitas strategi intelijen, serta mengidentifikasi metode pelatihan dan faktor motivasi yang efektif dalam meningkatkan kapabilitas personel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, D., & Gunawan, H. (2021). Pendekatan teori jaringan kriminal dalam pemberantasan kejahatan terorganisir. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Andika, P. (2022). *Penerapan strategi intelijen dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di kepolisian wilayah Jawa Timur*. Universitas Airlangga.
- Andika, P. (2022). *Penerapan strategi intelijen kepolisian dalam mengungkap kasus narkoba di wilayah Jawa Timur*. Universitas Airlangga.
- Badan Intelijen Keamanan Polri. (2020). Peraturan kepala badan intelijen keamanan. *peraturan kepala badan intelijen keamanan, Divisi Hukum Polri* diakses dari sisdivkum.id
- Badan Narkotika Nasional. (2021). *Laporan tahunan pemberantasan narkoba di Indonesia*. Jakarta: BNN.
- Basile, G., et al. (2020). Identifying individuals associated with organized criminal networks: Techniques and challenges in intelligence operations. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 60.
- Damayanti, R. (2021). Peran kepemimpinan dalam implementasi strategi organisasi di perusahaan Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kepemimpinan*, 10(2).
- Fitriyani, A., & Harahap, M. (2022). Efektivitas pengelolaan jaringan informasi intelijen dalam mendukung tugas kepolisian. *Jurnal Kepolisian Indonesia*, 9(1).
- Hartono, A., & Widjaja, D. (2022). Struktur dan koordinasi dalam jaringan sindikat narkoba di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Kontemporer*, 6(1).
- Hartono, S., & Lili, M. (2022). Evaluasi dan kontrol strategi organisasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. *Jurnal Bisnis dan Strategi*, 12(3).
- Hasan, R., & Nurhadi, D. (2022). Peran strategi intelijen dalam pemberantasan sindikat narkoba: Studi kasus di wilayah Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(2).
- Hendriani, R. (2020). Etika dan legalitas dalam pengelolaan intelijen kepolisian di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 14(2).
- Hidayat, R., & Sari, P. (2022). Pemanfaatan big data dan AI dalam manajemen intelijen kepolisian. *Jurnal Teknologi Keamanan Siber*, 4(1).
- Kusuma, D., & Lestari, S. (2023). Manajemen intelijen adaptif dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan. *Jurnal Manajemen Intelijen*, 4(2).

- Kusuma, H. (2021). Tantangan dan solusi pengungkapan kasus narkoba di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1).
- Lestari, D. & Nugroho, A., 2021. The importance of institutional synergy in public service delivery. *Indonesian Journal of Public Administration*, 12(3).
- Lestari, D., & Fajar, M. (2021). Manajemen informasi adaptif dalam organisasi modern. *Jurnal Manajemen dan Teknologi Informasi*, 9(2).
- Lestari, D., & Santoso, H. (2022). Integrasi nilai kearifan lokal dalam strategi organisasi Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 11(3).
- Lestari, I. (2021). Strategi adaptif dalam organisasi modern: Studi pada perusahaan rintisan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Inovasi*, 6(2).
- Lestari, M. (2023). *Kendala dan solusi pelaksanaan intelijen dalam pemberantasan narkoba di Surabaya*. Universitas Airlangga.
- Lestari, M. (2023). *Kendala implementasi strategi intelijen pemberantasan narkoba di Surabaya*. Universitas Airlangga.
- Marbun, P. (2022). Penetapan sasaran strategis berbasis SMART pada organisasi bisnis. *Jurnal Manajemen Strategik Indonesia*, 8(1).
- Mazerolle, L., et al. (2025). Police-led interventions for deterring organized crime. *Journal of Crime and Justice*.
- Nugroho, E., & Wibowo, A. (2021). Strategi organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 7(2).
- Nugroho, T., & Wahyudi, R. (2021). Analisis simpul kunci dalam jaringan narkoba dan implikasinya terhadap penegakan hukum. *Jurnal Analisis Keamanan*, 9(3).
- Nurhayati, S. (2024). *Peran intelijen kepolisian dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba melalui pendekatan community policing di Surabaya*. Universitas Airlangga.
- Permadi, Arif, and Yulianti Sari. 2021. "Regulasi dan Kebijakan dalam Mendukung Kerja Sama Lintas Lembaga." *Jurnal Hukum dan Pemerintahan* 8, no. 4.
- Prabowo, Budi, and Kartika Dewi. 2021. "Peran Kepemimpinan dalam Mendorong Sinergi Antar Lembaga Pemerintah." *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 2.
- Pranoto, B., & Mukti, Y. (2021). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas manajemen intelijen. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 7(3).
- Pranoto, Y. (2020). Manajemen strategik: Seni dan ilmu dalam mencapai keunggulan organisasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1).
- Prasetyo, R. (2021). Rekomendasi intelijen sebagai dasar perencanaan operasi kepolisian. *Indonesian Journal of Criminal Justice*, 5(1).
- Pratama, F., Lestari, S., & Putri, R. (2023). Distribusi dan logistik dalam sindikat narkoba: Studi kasus di Jawa Barat. *Jurnal Kajian Kriminal*, 11(2).
- Putra, A., & Kusuma, R. (2022). Strategi bisnis dan keunggulan kompetitif dalam perusahaan menengah Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 13(1).
- Putri, A., & Rahman, S. (2020). Keamanan data dan privasi dalam sistem informasi intelijen. *Jurnal Sistem Informasi dan Keamanan*, 5(2).
- Putri, D. A., & Aditya, M. (2023). Formulasi strategi dan kebijakan sumber daya manusia di era digital. *Jurnal Pengembangan Organisasi*, 9(1).

- Rahadi, I. & Sari, T., 2023. Digital transformation and inter-agency synergy in governance. *Journal of Information Systems and Technology*, 8(1).
- Rahardjo, B., & Wirawan, A. (2020). Visi dan misi sebagai pondasi dalam perencanaan strategis organisasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(4).
- Rahman, F. (2021). Intelijen kepolisian sebagai sistem information feedback dalam pengelolaan risiko keamanan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 7(1).
- Rahman, F., Putra, M., & Sari, L. (2023). Pengaruh transformasi digital terhadap pengembangan strategi organisasi. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 9(1).
- Rahmawati, D., & Nugraha, A. (2023). Transformasi digital dan manajemen informasi di era big data. *Jurnal Sistem Informasi Indonesia*, 15(1).
- Rahmi, N., & Prasetyo, B. (2021). Pengaruh teknologi informasi terhadap dinamika jaringan kriminal di Indonesia. *Jurnal Teknologi Keamanan*, 4(2).
- Santoso, E. (2020). Tata kelola informasi dan keamanan data dalam manajemen informasi. *Jurnal Keamanan Siber*, 3(3).
- Santoso, Endra, and Latif Rahman. 2022. "Komitmen Lembaga dalam Membangun Sinergi Berkelanjutan." *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia* 14, no. 2.
- Santoso, R. (2022). Adaptasi jaringan kriminal dalam menghadapi tekanan aparat penegak hukum. *Jurnal Kajian Keamanan*, 8(3).
- Sari, D., & Putra, A. (2022). Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen intelijen kepolisian. *Jurnal Teknologi dan Keamanan*, 5(3).
- Sari, Fitri, and Prasetyo Nugroho. 2022. "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Memperkuat Sinergi Lintas Lembaga." *Jurnal Teknologi dan Manajemen* 13, no. 1.
- Sari, M., & Ramadhan, I. (2021). Model desentralisasi dalam operasi sindikat narkoba di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 5(4).
- Sari, P., & Adi, R. (2021). Tingkatan dan implementasi strategi organisasi di perusahaan nasional. *Jurnal Pengembangan Organisasi*, 8(4).
- Sari, P., Nugroho, T., & Wibowo, A. (2020). Integrasi strategi fungsional dalam pengembangan organisasi. *Jurnal Pengembangan Organisasi*, 7(3).
- Setiawan, A., & Putri, F. R. (2023). Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan intelijen kepolisian. *Jurnal Teknologi Penegakan Hukum*, 5(1).
- Setiawan, Agus, and Rahayu Lestari. 2023. "Sumber Daya sebagai Penunjang Sinergi Organisasi: Studi Kasus pada Lembaga Pemerintah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Manajemen* 17, no. 1.
- Situmorang, A. M. (2020). Dinamika jaringan sindikat narkoba dan upaya pengungkapan oleh kepolisian. *Jurnal Sosial dan Keamanan*, 14(3).
- Suryani, R., & Putra, B. (2021). Konsep dan aplikasi manajemen informasi dalam organisasi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1).
- Suryanto, M., 2022. Building mutual trust for institutional synergy in Indonesian public sector. *Journal of Organizational Culture*, 14(2).
- Suryanto, T., & Hadi, R. (2021). Analisis SWOT dalam perencanaan strategis organisasi: Studi kasus perusahaan manufaktur. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2).
- Sutanto, D., & Haryanto, F. (2021). Pengembangan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi intelijen. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(4).

- Sutrisno, T. (2021). Peran intelijen kepolisian dalam deteksi dini ancaman keamanan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 8(2).
- Utami, S., & Fauzi, M. (2023). Analisis hubungan sosial dalam jaringan kriminal: Studi kasus di wilayah Jawa Timur. *Jurnal Sosial dan Keamanan*, 7(1),
- Wahyu, R. (2021). *Inovasi strategi intelijen dengan teknologi big data dalam pemberantasan narkoba*. Universitas Airlangga.
- Wibowo, T. (2022). Sinergi antar lembaga dalam pemberantasan narkoba di tingkat daerah. *Jurnal Administrasi Kepolisian*, 12(2).
- Wibowo, T. (2023). Komunikasi digital dan koordinasi lintas lembaga dalam manajemen intelijen. *Jurnal Komunikasi dan Informasi*, 11(1).
- Wicaksono, B. & Purnomo, E., 2020. Challenges of inter-agency coordination in law enforcement. *Journal of Security Studies*, 5(4).
- Wicaksono, B. (2020). Analisis informasi intelijen sebagai alat bantu pengambilan keputusan kepolisian. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(4).
- Wijaya, P. (2020). Struktur desentralisasi dalam jaringan kriminal: Tantangan bagi penegakan hukum. *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*, 10(2),
- Wulandari, Rina, and Haryanto Gunawan. 2020. "Budaya Organisasi dan Dinamika Sinergi Antar Lembaga." *Jurnal Sosiologi dan Komunikasi* 9, no. 3.
- Wulandari, S., & Prasetyo, E. (2021). Klasifikasi strategi organisasi: Pendekatan korporat, bisnis, dan fungsional. *Jurnal Manajemen Strategis Indonesia*, 9(2).
- Yuliana, R. & Dewi, F., 2021. Organizational culture and conflict management in inter-agency cooperation. *Management Review Indonesia*, 9(1).
- Yuliana, R. (2022). Komunikasi dan diseminasi informasi intelijen dalam organisasi kepolisian. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Kepolisian*, 3(1).
- Yuliani, N. (2020). Peran pelindung dalam jaringan narkoba: Perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 12(1).